

MENDORONG PERTUMBUHAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DENGAN PROGRAM – PROGRAM BERBASIS *KNOWLEDGE MANAGEMENT*

Oleh : Lie Liana dan Kis Indriyaningrum
Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank

ABSTRACT

UMKM (Small Medium Micro Business) plays a very important role in Indonesia, especially in creating the job opportunity that is considered as a safety closure in the process of national economic recovery. Based on the significant role of the UMKM, there are many efforts done by either the government or the bank to empower the UMKM, but the targeted result is not achieved yet. The government has maintained several targets in empowering UMKM, in order to realize them some guidance regulations have been made and clarified in the development programs as mentioned in the RPJMN 2004 – 2009.

The general targets to be achieved in encouraging the development of the growth of UMKM above are clarified in the following programs: The program of choosing the personality with commitment, the program of forming LKM (Micro Financial Foundation) that supports UMKM as the source of investment for UMKM. The co-operation program with Colleges as the source of research, the program of partnership with the modern retailer in opening the access for the markets of UMKM, and mapping of the potential business.

Keywords: Micro Business, Small Business, Medium Business, Management Knowledge

PENDAHULUAN

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, yang kemudian diikuti oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan, mengakibatkan perekonomian Indonesia mengalami resesi ekonomi yang hebat. Krisis ini sangat berpengaruh negatif terhadap kegiatan ekonomi. Efek negatif dari suatu gejolak ekonomi terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ada dua. Pertama, seperti yang dialami oleh Indonesia pada saat krisis mencapai puncaknya pada tahun 1998, akibat pengetatan likuiditas perekonomian nasional, maka suku bunga pinjaman menjadi sangat tinggi. Akibatnya sektor perbankan mengalami masalah utang macet, sehingga akses ke bank menjadi sulit. Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) meningkat tajam, membuat suku bunga di bank-bank umum menjadi sangat tinggi. Hal tersebut menyebabkan pengusaha sulit mendapatkan kredit baru dari bank, sehingga banyak usaha, tidak hanya UMKM tetapi juga UB mengalami stagnasi atau terpaksa gulung tikar karena tidak ada dana untuk kebutuhan

modal kerja maupun investasi. Kedua, harga-harga dari bahan-bahan baku serta material-material produksi lainnya juga mengalami peningkatan yang tajam, khususnya bahan-bahan yang diimpor karena nilai tukar rupiah mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika. Kenaikan biaya produksi akibat kenaikan harga-harga tersebut mengakibatkan banyak UB gulung tikar atau paling tidak mengurangi volume produksi. Efek positif dari sisi penawaran adalah munculnya keinginan UB untuk melakukan mitra usaha dengan UKM, karena kondisi yang memaksa. Akibat biaya *overhead* dan biaya produksi meningkat yang disebabkan oleh depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sehingga harga-harga impor dalam rupiah menjadi sangat tinggi, memaksa UB untuk merevisi kembali strategi bisnis mereka. Salah satu perubahannya adalah dengan melakukan aliansi strategis dengan UMKM, misalnya lewat sistem *subcontracting* (Tambunan, 2002: 11-13).

Namun demikian, dari sisi produksi, suatu krisis ekonomi seperti yang dialami oleh Indonesia itu juga dapat memberi sejumlah dorongan positif bagi pertumbuhan *output* di

UMKM. Efek positif ini lewat pasar tenaga kerja (*labour market effect*), yaitu pertumbuhan jumlah unit usaha, jumlah pekerja, dan pengusaha baru, khususnya di UKM, akibat banyaknya jumlah pekerja di sektor formal yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Oleh karena suatu desakan untuk mempertahankan hidup, sebagian besar dari pekerja tersebut terpaksa melakukan kegiatan ekonomi apa saja yang dapat dikerjakan dengan modal yang ada dan sumber daya lainnya yang dimiliki saat itu, termasuk membuka usaha skala kecil sendiri atau bekerja di UK milik orang lain yang masih dapat beroperasi.

Berdasarkan data ini dapat dikatakan bahwa UMKM memegang peranan sangat penting di Indonesia terutama dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi, penopang kegiatan ekonomi lokal, pencipta pasar baru dan inovasi, sumbangannya yang cukup besar dalam menjaga neraca pembayaran dalam menghasilkan ekspor, serta menciptakan lapangan kerja kerja terbesar sehingga dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Sektor UMKM identik dengan rakyat kecil yang memiliki potensi besar untuk mengikis kemiskinan dan pengangguran, selaras dengan Millenium Development Goals (MDGs). MDGs adalah proyek kemanusiaan yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa selama 15 tahun (2000-2015) dan disepakati semua anggota PBB (Maskur, 2007: 1).

Apabila UMKM ini hidup maka dapat dipastikan bahwa perekonomian di negara ini juga akan hidup. Kalau perekonomian di negara ini hidup maka rakyat juga akan sejahtera. Suatu bangsa akan sejahtera kalau rakyatnya sejahtera. Kalau skala mikro, kecil dan menengah ini bisa dihidupkan, dan usaha-usaha mereka bisa bergerak, maka kesejahteraan pada tingkat rakyat kecil tapi dengan skala yang besar akan menjadi tolok ukur bagi kesejahteraan masyarakat. Sekarang lebih dari 90% rakyat berada pada usaha mikro dan kecil. Kalau misalnya mereka tidak berdaya, maka sebesar itu pun pula jumlah rakyat kita yang tidak berdaya.

Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa UMKM memegang peranan sangat penting di Indonesia terutama dalam hal penciptaan kesempatan kerja sehingga dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Perannya dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja diharapkan menjadi langkah awal bagi upaya pemerintah menggerakkan sektor produksi pada berbagai lapangan usaha. Argumentasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa, keunggulan alamiah yang dimiliki Indonesia adalah jumlah tenaga kerja, khususnya dari golongan berpendidikan rendah dan bahan baku yang berlimpah. Kondisi ini membuat upah tenaga kerja dan harga bahan baku di Indonesia relatif lebih murah dibandingkan negara-negara lain yang penduduknya sedikit dan miskin sumber daya alam (Tambunan, 2002: 29).

Berdasarkan peran UMKM yang begitu besar ini, sudah banyak usaha dilakukan oleh pemerintah maupun perbankan. Pemerintah telah menetapkan sejumlah sasaran untuk pemberdayaan UMKM, yang kemudian untuk mewujudkan sasaran tersebut dibuat arah kebijaksanaan, yang seterusnya sasaran dan arah kebijakan dijabarkan dalam program-program pembangunan yang merupakan strategi implementasi, seperti yang termuat dalam RPJMN 2004-2009. Selain itu pemerintah juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden No.6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Selain itu untuk menguatkan posisi sektor ini dalam kancah perekonomian, pemerintah menyiapkan beragam program termasuk menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang UMKM. Sedangkan Bank Indonesia telah mengupayakan berbagai alternatif melalui peluncuran Paket Kebijakan di bidang Perbankan, penurunan BI-rate maupun langkah nyata berupa penyediaan informasi bisnis, bazaar intermediasi perbankan dan kegiatan lainnya. Hal ini sempat memunculkan harapan baru.

Berbagai upaya tersebut memang memberikan dampak positif terhadap perkembangan perbankan dan sektor riil. Tetapi ternyata, pertumbuhan sektor UMKM masih jauh dari harapan karena masih selalu terjebak pada masalah klasik dan kompleks yang dihadapi. Dari sisi internal, antara lain kualitas sumber daya manusia, modal kerja, penyediaan bahan baku, kewirausahaan, organisasi, dan manajemen usaha. Dari sisi eksternal, meliputi pengadaan bahan baku, akses ke lembaga pembiayaan/kredit, pemasaran, persaingan, birokrasi, dan dukungan kebijakan ekonomi yang belum sepenuhnya memihak masyarakat lapis bawah. Tersumbatnya penyaluran kredit perbankan ke sektor UMKM, dan masih rendahnya penyerapan kredit Perbankan oleh dunia usaha seolah-olah menjadi persoalan yang tak pernah kunjung selesai. Namun demikian kita tidak boleh pesimis, karena diyakini masih banyak inovasi-inovasi lain yang mampu mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan maupun pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Sasaran

Berdasarkan permasalahan pokok yang dihadapi oleh UMKM yang bisa dirangkum menjadi permodalan, sumberdaya manusia, manajemen, kualitas produksi dan pemasaran, informasi serta kemitraan, serta adanya keluhan bahwa sebenarnya sudah banyak usaha dilakukan untuk memberdayakan UMKM, tetapi hasil yang diinginkan belum juga tercapai, maka sasaran umum yang ingin dicapai dalam rangka mendorong pertumbuhan UMKM adalah:

1. Meningkatnya komitmen bagi orang-orang yang mendapat tugas untuk memberdayakan UMKM.
2. Berfungsinya lembaga yang bertugas membantu UMKM dalam mengatasi permodalan.
3. Terbentuknya pusat informasi yang dapat memenuhi kebutuhan UMKM akan berbagai informasi yang diperlukan.

4. Berfungsinya Perguruan Tinggi sebagai pusat ilmu untuk membantu UMKM melalui proses pembelajaran dan hasil-hasil penelitian.
5. Meningkatnya program kemitraan untuk membantu UMKM dalam rangka membuka akses pasar.
6. Meningkatnya kemampuan daerah untuk menciptakan produk unggulan UMKM.

Program-Program Pendorong Pertumbuhan UMKM

Sasaran umum yang ingin dicapai dalam rangka mendorong pertumbuhan UMKM tersebut di atas dijabarkan ke dalam program-program sebagai berikut:

Program pemilihan pribadi yang mempunyai komitmen

Paket program pemberdayaan UMKM yang ada sudah sangat banyak, tetapi pada kenyataannya hasil yang dicapai belum maksimal. Program pemberdayaan UMKM yang terdapat dalam RPJMN 2004-2009 meliputi penciptaan iklim usaha bagi UMKM, pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM telah dijelaskan begitu jelas, namun UMKM tetap saja belum berkembang sesuai harapan. Berdasarkan hal ini diduga ada yang salah pada diri pelaku paket program tersebut.

Program ini bertujuan mendapatkan pelaku yang mempunyai rasa optimis dan komitmen dengan hati yang tulus dan bersih untuk sungguh-sungguh melaksanakan tugas memberdayakan UMKM. Program ini mencakup aktivitas sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi beberapa pengelola UMKM yang telah berhasil dalam mengelola usahanya secara profesional serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
2. Mengidentifikasi lebih lanjut dari para pengelola UMKM tersebut yang berhasil dalam membina kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, serta aktif dalam suatu organisasi.

Berdasarkan identifikasi dari no. 1 dan 2 di atas, diharapkan akan didapatkan orang-orang yang profesional, jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta mempunyai jiwa kepemimpinan.

3. Meminta kesediaan pengelola yang telah memenuhi syarat di atas tersebut untuk ikut sebagai anggota tim yang bertugas memberdayakan UMKM.
4. Memberikan imbalan yang layak sebagai anggota tim.
5. Menyusun sanksi pidana dan administratif bagi anggota tim yang tidak menjalankan tugasnya, artinya mereka justru merugikan pemberdayaan UMKM.

Program pembentukan LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang berpihak pada UMKM sebagai sumber kredit investasi bagi UMKM

Akses keuangan atau kredit adalah kunci bagi kemakmuran. Mereka yang kaya justru mendapat akses lebih mudah untuk mendapat kredit. Akhirnya yang kaya memiliki kesempatan lebih besar untuk lebih kaya. Sebaliknya orang miskin tidak memiliki akses untuk pendanaan dan akan tetap miskin. Ada kaitan yang sangat dekat antara peningkatan akses kepada pendanaan dan pengurangan kemiskinan. Survei terakhir mengenai iklim investasi juga mengonfirmasikan pandangan tersebut. Mayoritas UMKM memiliki masalah akses pendanaan sebagai masalah utama.

UMKM divonis tidak *bankable* karena memiliki beberapa permasalahan, yaitu: minimnya sumber daya manusia (tenaga profesional), manajemen/pembukuan masih tradisional, administrasi kurang rapi, kurangnya akses pemasaran, mengalami kesulitan mengakses modal pada lembaga keuangan bank maupun nonbank karena kurangnya agunan. Berdasarkan Badan Pembina BKK Provinsi Jawa Tengah ada sifat dari pengelola UMKM yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memberikan kredit, yaitu sifat dapat dipercaya, pola pikir dan gaya hidup sederhana, serta masih adanya budaya malu.

Program pembentukan LKM ini bertujuan mengatasi masalah UMKM dalam mengakses dana. Program ini mencakup aktivitas sebagai berikut:

1. LKM harus mempunyai komitmen untuk memperluas kredit, sehingga bisa menjangkau setiap orang terutama di sektor UMKM yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal.
2. LKM harus memberikan layanan jasa keuangan beragam (simpan, pinjam, dan lain-lain) yang didesain dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan riil UMKM yang dilayani. Untuk hal ini bisa dibangun jaringan: Bank Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten, Bank Pasar untuk perdagangan, serta Bank Desa untuk gerakan menabung.
3. LKM harus berlokasi di wilayah UMKM yang hendak dilayaninya.
4. Manajemen LKM dilakukan oleh staf lokal, karena staf lokal yang mengetahui secara baik mengenai UMKM yang ada di daerahnya.
5. Kebijakan LKM diarahkan untuk menciptakan sebuah kerangka kerja hukum untuk membawa pelayanan keuangan yang maksimal untuk UMKM.
6. LKM harus menerapkan sistem keuangan yang inklusif, artinya tidak ada orang yang ditolak untuk mendapatkan pelayanan.
7. LKM harus membuat terobosan hukum baru untuk menyalurkan kredit untuk UMKM tanpa agunan fisik.
8. Dibentuk *Wholesale Fund*. Dengan demikian, setiap orang yang ingin meminjamkan uang kepada UMKM bisa mendapatkan dana dari *Wholesale Fund* tersebut.
9. Dibentuk badan pengawas independen untuk mengawasi penyimpangan kredit untuk UMKM.

Program pembangunan Pusat Informasi UMKM berdasarkan *knowledge management* sebagai sumber informasi

Salah satu penghambat kemajuan UMKM adalah keterbatasan pengetahuan mengenai jaringan pemasaran, maupun penguasaan pasar.

Kondisi ini membuat produk-produk yg dihasilkan kurang bisa bersaing di pasar internasional. Untuk mengatasi berbagai masalah itu sebaiknya dibangun sebuah Pusat Informasi UMKM. Pelaku UMKM harus mendapatkan banyak kemudahan dalam mengakses berbagai informasi dan fasilitas demi kemajuan usahanya agar mereka bisa mengembangkan bisnis lebih pesat. Pusat Informasi ini nantinya akan menjadi pusat data, informasi, dan segala kebutuhan pelaku usaha UMKM. Pusat Informasi UMKM ini akan menjadi jaringan penghubung antarpelaku usaha UMKM. Sehingga apabila ada satu pengusaha UMKM yang telah mengembangkan satu jenis usaha, pengetahuan dan pengalamannya bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha lainnya. Dengan demikian pelaku usaha baru itu tidak perlu memulai usahanya dari awal lagi.

Diharapkan pula melalui Pusat Informasi UMKM ini, pelaku UMKM bisa menggali berbagai informasi yang mereka butuhkan. Mereka juga bisa minta pembinaan untuk mengembangkan produk agar lebih mampu bersaing. Pusat Inovasi menjadi gerbang tunggal kebutuhan UMKM. Apa pun yang dibutuhkan UMKM bisa diperoleh di situ, termasuk penyedia informasi pasar, pembiayaan, teknologi, serta bantuan pendaftaran hak karya intelektual. Pusat Informasi UMKM ini sebaiknya merupakan *platform* sinergi berbagai instansi pemerintah dan swasta, jadi pihak swasta dilibatkan.

Program ini bertujuan mengembangkan jaringan bisnis dalam rangka meningkatkan penguasaan pasar, informasi komoditi, peluang usaha baru, dan ekspansi usaha. Program ini mencakup berbagai aktivitas sebagai berikut:

1. Mengembangkan infrastruktur komunikasi bisnis dan membuat *database* UMKM di Indonesia melalui sistem teknologi informasi.
2. Memberikan fasilitas perangkat jaringan komunikasi yang berisikan program aplikasi: aktivitas pemerintah secara *online* (*e-goverment*), aktivitas *e-commerce*, *website* untuk optimalisasi interaksi bisnis, monitoring dan aplikasi keuangan.

3. Memfasilitasi pelaksanaan temu konsultasi dan temu bisnis.
4. Menerbitkan dan mendistribusikan direktori dan brosur produk-produk unggulan UMKM.

Program pembangunan pusat informasi ini didasari *knowledge management*. *Knowledge management* adalah sebuah konsep yang relatif baru yang bergerak di atas infrastruktur teknologi informasi (*internet & intranet*) yang ada (Purbo, 2000). *Knowledge management* difokuskan untuk menjadi seseorang/sebuah institusi agar menang dalam kompetisinya karena memiliki pengetahuan yang lebih baik daripada kompetitornya. Isu utama di *knowledge management* adalah *competitiveness*. *Competitiveness* tersebut diperoleh dengan cara mengelola pengetahuan yang kita miliki dengan baik dan efisien.

Knowledge management sendiri merupakan sebuah proses yang kompleks, oleh karena itu tidak mungkin hanya ditangani oleh sebuah vendor saja. Untuk dapat sukses mengimplementasikan *knowledge management* harus menggabungkan berbagai solusi yang ada menjadi satu kesatuan yang komprehensif.

Dalam sebuah artikel di Information Week, Jeff Angus & Jeetu Patel menggambarkan empat (4) proses yang menggambarkan *knowledge management*, yaitu:

| Proses Utama | Aktifitas |
|--------------------------------|---|
| Pengumpulan & pemasukan data | OCR & scanning Pemasukan suara Mengambil informasi dari berbagai sumber Mencari informasi untuk dimasukkan |
| Pengorganisasian pengkatalogan | / Pengindexan Pemfilteran Link / penghubungan |
| Pemurnian & pemberian konteks | Kerjasama Compacting Projecting Data Mining |
| Aliran diseminasi | Sharing Alert Push |

Ada dua langkah yang perlu dilakukan pada rencana sebuah *knowledge management*, yaitu:

- a. Melakukan survei akan kebutuhan institusi tersebut dengan memper-hitungkan semua aktifitas di atas untuk memenuhi kebutuhan yang ada.
- b. Menemukan atau membuat perangkat lunak yang cocok dalam konteksnya untuk rencana secara keseluruhan.

Untuk mengerjakan ini semua dibutuhkan orang yang mempunyai pendidikan di bidang komputer dan ilmu informasi.

Program sinergi dengan Perguruan Tinggi sebagai sumber pembelajaran.

UMKM tidak bisa hanya mengandalkan modal dalam bentuk dana untuk menjalankan usahanya, tetapi juga membutuhkan modal pengetahuan (*knowledge*) berupa modal intelektual untuk memenangkan persaingan. Proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi perlu mengajarkan kepada masyarakat suatu pandangan yang lebih realistis, yaitu masyarakat yang mempunyai pola konsumsi yang rasional dan wajar dan hemat dalam penggunaan faktor produksi. Pendidikan mempunyai peran untuk terus berusaha memperkenalkan peserta didik pada berbagai kerja produktif, bersemangat untuk berinisiatif yang dapat menimbulkan pekerjaan. Banyak usaha yang menyediakan produk yang sama, namun hanya beberapa produk saja yang bisa diterima pasar. Produk pun juga membutuhkan inovasi terus menerus. Di dunia bisnis gerak langkah perusahaan akan selalu berubah seiring dengan perkembangan terkini dan tuntutan masyarakat yang selalu dinamis. Untuk bisa melakukan transformasi dengan cepat di tengah persaingan yang makin sengit, kuncinya adalah pada saat kita melakukan transformasi bisnis tersebut dengan menerapkan strategi *knowledge management* yang tepat. Pemimpin perusahaan harus mampu membawa sumber daya manusianya ke arah bagaimana menciptakan pekerjaan yang berbasis *knowledge*. Peran seorang pemimpin dalam melakukan perubahan adalah menjadi salah satu kunci

keberhasilan dalam mentransformasi nilai-nilai perusahaan.

Program ini bertujuan untuk memberikan modal pengetahuan (*knowledge*) yang dibutuhkan untuk meningkatkan profesionalisme pengelola UMKM melalui jalur pendidikan. Diharapkan anak-anak yang orang tuanya adalah pengelola UMKM, diarahkan agar mereka mau meneruskan usaha orang tuanya secara profesional. Untuk itu mereka juga dididik dengan materi yang membentuk diri menjadi seorang profesional. kewirausahaan dan manajemen pemasaran, produksi, kepemimpinan, dan lain-lain. Mereka sangat punya peluang untuk membesarkan UMKM milik orang tuanya. Sedangkan bagi orang tua siswa yang bukan pengelola UMKM juga bisa belajar apabila mempunyai kemauan untuk mendirikan UMKM.

Program ini mencakup aktivitas sebagai berikut:

1. Menyusun kurikulum yang berbasis proses pembelajaran bagi profesionalisme UMKM yang berkaitan dengan materi kewirausahaan, manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen strategi, kepemimpinan, dan lain-lain.
2. Memberikan transfer *knowlegde* dari para pengelola UMKM yang telah berhasil mengembangkan usahanya secara profesional.
3. Memberi kesempatan magang pada UMKM yang telah berhasil dikembangkan secara profesional.

Program Sinergi dengan Perguruan Tinggi sebagai sumber penelitian

Program ini bertujuan untuk memanfaatkan lembaga-lembaga penelitian, termasuk universitas, untuk menjadi pusat-pusat inovasi unggulan dengan spesialisasi pada sektor-sektor tertentu sesuai kelebihan yang dimiliki. Lembaga penelitian itu akan mengembangkan inovasi khususnya dalam bidang pertanian (mencakup sektor pertanian pangan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan), karena sebagian UMKM bergerak pada bidang pertanian. Lembaga penelitian ini

pula yang akan bergerak melakukan pembinaan UMKM ini. Itu berarti, solusi dan pembinaannya dilakukan oleh orang-orang terdekat yang memahami betul tentang masalah yang dihadapi kalangan UMKM.

Program ini mencakup aktivitas sebagai berikut:

1. Model pemberdayaan pelaku UMKM dalam pengetahuan dan ketrampilan, kelembagaan, penguasaan desain, teknologi, permodalan serta sistem klaster.
2. Pengembangan model kemitraan UMKM dengan pelaku usaha dan industri besar, serta model tata niaga produk UMKM.
3. Pengembangan model sistem informasi terpadu UMKM.
4. Penelitian dan pengembangan model klaster / sentra UMKM.
5. Pemetaan potensi unggulan bahan baku industri di tiap Provinsi.
6. Pengembangan model tata niaga dalam negeri dan ekspor hasil produksi dalam negeri.
7. Model pemberdayaan petani, dalam bidang-bidang pengetahuan dan ketrampilan serta penguasaan teknologi pertanian, pembentukan kelompok, pembiayaan usaha pertanian, pengembangan agrobisnis dan agroindustri.
8. Pengembangan potensi unggulan lokal produk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan perikanan.
9. Penerapan bibit/benih unggul pertanian, teknologi produksi dan teknologi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan.
10. Pengembangan informasi produksi pertanian yang mudah diakses petani.
11. Pengembangan usaha tani terpadu dan teknologi pertanian organik.
12. Pengembangan tata niaga hasil pertanian yang mudah diakses oleh dan memihak petani.
13. Penelitian dan pengembangan komoditas agro sebagai bahan baku industri.

Program Kemitraan dengan peritel modern dalam rangka membuka akses pasar UMKM

Program ini bertujuan agar produk peritel besar tidak mematikan produk UMKM karena dari segi kualitas dan kuantitas, produk UMKM akan kalah bersaing dengan produk dari peritel besar. Peritel besar seperti *hipermarket*, *departement store*, *supermarket* maupun *minimarket* akan lebih menyukai untuk memasarkan produk dari industri besar. Namun demikian pemerintah tidak perlu memberikan proteksi yang berlebihan pada UMKM, tetapi yang perlu dilakukan adalah upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan daya saingnya. Untuk itu pemerintah perlu mengupayakan agar UMKM dapat meningkatkan kinerjanya dalam memperbaiki mutu produk, standar pengemasan dan promosi.

Program ini mencakup aktivitas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan promosi dengan cara sesering mungkin mengadakan pameran produk yang dinilai layak secara kualitas dan relatif kompetitif untuk ekspor. Hal tersebut perlu dilakukan agar produk UMKM mampu bersaing dan menembus pasar ritel modern menuju pasar internasional.
2. Melakukan intervensi pasar dalam bentuk pembagian wilayah usaha (*zoning*) antara pasar tradisional dan ritel modern.
3. *Hipermarket*, *departement store*, *supermarket* dan *minimarket* yang berdiri sendiri wajib menyediakan tempat usaha untuk UMKM yang mampu dibeli atau disewa atau dapat dimanfaatkan oleh UMKM melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.
4. Dalam rangka mengembangkan kemitraan itu, tidak boleh ada syarat biaya pendaftaran barang dan pembayaran dilakukan secara tunai, atau paling lambat 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
5. Permintaan ijin usaha pengelolaan *hipermarket*, *departement store*, *supermarket* maupun *minimarket* harus dilengkapi hasil analisis dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.

6. *Hipermarket, departement store, supermarket*, maupun *minimarket* tidak boleh banyak-banyak menjual hasil produksi dan kemasan mereka sendiri (*private label*).
7. Program ini dilaksanakan oleh Pemerintah dengan cara bekerjasama dengan peritel modern.

Pemetaan Potensi Usaha

Pemetaan potensi bertujuan agar masing-masing daerah mampu menampilkan dan menciptakan produk unggulan yang khas daerahnya. Dari hasil pemetaan tersebut diharapkan dapat ditentukan kegiatan ekonomi utama yang dapat dijadikan penggerak potensi usaha dan jenis potensi-potensi usaha yang dapat dikembangkan dengan efisien, produktif dan berdaya saing.

Program ini mencakup aktivitas sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan memetakan sentra bisnis UMKM dan menginven-tarisasi potensi unggulan di daerah masing-masing.
2. Memfasilitasi pengembangan sentra UMKM di masing-masing daerah menjadi klaster bisnis yang dinamis.
3. Mengembangkan sentra bisnis UMKM dengan meningkatkan produktivitas dengan menggunakan teknologi tepat guna.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara kontinyu.
5. Program ini perlu campur tangan pemerintah.

PENUTUP

Disadari bersama bahwa sebenarnya keberadaan UMKM sungguh dapat digunakan sebagai salah satu pilar penyangga perekonomian, apabila ada kesungguhan dalam penggarapan UMKM. Pembangunan ekonomi di Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi jangan hanya bertumpu pada Usaha Besar saja sebagai motor penggerak ekonomi, tetapi perlu sekali melibatkan UMKM, karena secara empiris keberadaan UMKM juga mempunyai potensi dalam memberi sumbangan

dalam PDB dan mampu menyerap tenaga kerja yang besar.

Implementasi program-program yang diusulkan diharapkan dapat membantu dalam mendorong pertumbuhan UMKM karena dilaksanakan oleh pribadi-pribadi yang mempunyai rasa optimis dan komitmen dengan hati yang tulus dan bersih untuk sungguh-sungguh melaksanakan tugas member-dayakan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Koperasi dan UKM. 2004. Indikator Makro Ekonomi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2003. http://www.depkop.go.id/berita_resmi/index.htm. 20 Januari 2005.
- Direktori Industri Kecil Jawa Tengah 2003*. BPS. Katalog BPS: 6404.33. Penerbit: BPS Propinsi Jawa Tengah.
- Jawa Pos, Rabu 8 Agustus 2007 (hal. 1 dan 15)*. Tip Banker 'Si Miskin.'
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2004. Batasan/Kriteria Usaha Kecil dan Menengah Menurut Beberapa Organisasi. <http://www.menlh.go.id/usaha-kecil/top/kriteria.htm>. 20 Januari 2005.
- Knowledge Management. Bisnis Indonesia. Business Ligestyle*, 29 Juli 2007, hal. 3.
- Kristanti, J.A. dan L. Siringoringo. Gudang Jawaban Umkm Menengok Rencana Pemerintah Membentuk Pusat Inovasi Umkm. *Kontan, Minggu Iv, Juli 2007*, Hal. 37.
- Maskur, F.M., Tantangan Koperasi Mengikis Kemiskinan, *Laporan Khusus Koperasi & UKM*. Bisnis Indonesia. Kamis, 12 Juli 2007.

http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=661&Itemid=108

<http://onno.vism.org/v10/onno-ind-2/application/education/knowledge-management-09-2000.rtf>

RPJMN 2004-2009. 2006. Sinar Grafika. Jakarta.

Singgih, N. 2001. Kajian Pembinaan Industri Kecil dalam Memperkuat Struktur Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi*. No. 6 Th. 5 Juni: 77-82. Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka. Malang.

Tambunan, T. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. Edisi Pertama. PT. Salemba Empat Patria. Jakarta.

Theo, R. Ada yang Kecewa, Ada pula yang Tertawa, *Kontan Minggu II*, Juni 2007, h.37

Yudiarto, S. 2007. Micro Finance From Traditional to Professional, *Makalah pada Workshop Lembaga Keuangan Mikro dalam Perspektif Pendidikan* di STIE Stikubank Semarang.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang *Usaha Kecil*.